



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 934 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
[WBK] DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI [WBBM]
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri menetapkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Nasional;
- b. bahwa unit kerja yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI**

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan unit kerja sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di unit kerja tersebut untuk terus melanjutkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi sehingga unit kerja dapat menjadi unit kerja percontohan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RIJO KUMOLO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR : 934 TAHUN 2020

**TENTANG : UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) TAHUN 2020**

**NAMA-NAMA UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2020**

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)**

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Mahkamah Agung
2	Pengadilan Agama Bangil	Mahkamah Agung
3	Pengadilan Agama Bangli	Mahkamah Agung
4	Pengadilan Agama Banyuwangi	Mahkamah Agung
5	Pengadilan Agama Bogor	Mahkamah Agung
6	Pengadilan Agama Buol	Mahkamah Agung
7	Pengadilan Agama Dabo Singkep	Mahkamah Agung
8	Pengadilan Agama Jakarta Barat	Mahkamah Agung
9	Pengadilan Agama Jakarta Utara	Mahkamah Agung
10	Pengadilan Agama Jember	Mahkamah Agung
11	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	Mahkamah Agung
12	Pengadilan Agama Karawang	Mahkamah Agung
13	Pengadilan Agama Ketapang	Mahkamah Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
14	Pengadilan Agama Kolaka	Mahkamah Agung
15	Pengadilan Agama Kota Banjar	Mahkamah Agung
16	Pengadilan Agama Kota Madya Malang	Mahkamah Agung
17	Pengadilan Agama Lumajang	Mahkamah Agung
18	Pengadilan Agama Magelang	Mahkamah Agung
19	Pengadilan Agama Majalengka	Mahkamah Agung
20	Pengadilan Agama Marabahan	Mahkamah Agung
21	Pengadilan Agama Negara	Mahkamah Agung
22	Pengadilan Agama Nunukan	Mahkamah Agung
23	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	Mahkamah Agung
24	Pengadilan Agama Pasuruan	Mahkamah Agung
25	Pengadilan Agama Pati	Mahkamah Agung
26	Pengadilan Agama Pematang	Mahkamah Agung
27	Pengadilan Agama Praya	Mahkamah Agung
28	Pengadilan Agama Purwakarta	Mahkamah Agung
29	Pengadilan Agama Sawah Lunto	Mahkamah Agung
30	Pengadilan Agama Sentani	Mahkamah Agung
31	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	Mahkamah Agung
32	Pengadilan Agama Solok	Mahkamah Agung
33	Pengadilan Agama Sumenep	Mahkamah Agung
34	Pengadilan Agama Tanggamus	Mahkamah Agung
35	Pengadilan Agama Tanjung	Mahkamah Agung
36	Pengadilan Agama Tanjung Redeb	Mahkamah Agung
37	Pengadilan Agama Tarakan	Mahkamah Agung
38	Pengadilan Agama Tasikmalaya	Mahkamah Agung
39	Pengadilan Agama Tenggarong	Mahkamah Agung
40	Pengadilan Agama Tigaraksa	Mahkamah Agung
41	Pengadilan Agama Tulang Bawang	Mahkamah Agung
42	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	Mahkamah Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
43	Pengadilan Agama Wonosari	Mahkamah Agung
44	Pengadilan Agama Wonosobo	Mahkamah Agung
45	Pengadilan Militer I-02 Medan	Mahkamah Agung
46	Pengadilan Militer I-05 Pontianak	Mahkamah Agung
47	Pengadilan Militer II-10 Semarang	Mahkamah Agung
48	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	Mahkamah Agung
49	Pengadilan Militer III-17 Manado	Mahkamah Agung
50	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Mahkamah Agung
51	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Mahkamah Agung
52	Pengadilan Negeri Banjarnegara	Mahkamah Agung
53	Pengadilan Negeri Barabai	Mahkamah Agung
54	Pengadilan Negeri Denpasar	Mahkamah Agung
55	Pengadilan Negeri Kefamenanu	Mahkamah Agung
56	Pengadilan Negeri Kolaka	Mahkamah Agung
57	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	Mahkamah Agung
58	Pengadilan Negeri Luwuk	Mahkamah Agung
59	Pengadilan Negeri Malang	Mahkamah Agung
60	Pengadilan Negeri Maros	Mahkamah Agung
61	Pengadilan Negeri Masamba	Mahkamah Agung
62	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Mahkamah Agung
63	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Mahkamah Agung
64	Pengadilan Negeri Pelaihari	Mahkamah Agung
65	Pengadilan Negeri Pontianak	Mahkamah Agung
66	Pengadilan Negeri Praya	Mahkamah Agung
67	Pengadilan Negeri Raba/Birna	Mahkamah Agung
68	Pengadilan Negeri Singkawang	Mahkamah Agung
69	Pengadilan Negeri Sungai Liat	Mahkamah Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
70	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Mahkamah Agung
71	Pengadilan Negeri Temanggung	Mahkamah Agung
72	Pengadilan Negeri Tulungagung	Mahkamah Agung
73	Pengadilan Negeri Wonosari	Mahkamah Agung
74	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	Mahkamah Agung
75	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	Mahkamah Agung
76	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	Mahkamah Agung
77	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	Mahkamah Agung
78	Pengadilan Tinggi Agama Palu	Mahkamah Agung
79	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	Mahkamah Agung
80	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Mahkamah Agung
81	Pengadilan Tinggi Jambi	Mahkamah Agung
82	Pengadilan Tinggi Kendari	Mahkamah Agung
83	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Mahkamah Agung
84	Pengadilan Tinggi Palu	Mahkamah Agung
85	Pengadilan Tinggi Surabaya	Mahkamah Agung
86	Badiklat Jawa Tengah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
87	Bapas Kelas I Banjarmasin	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
88	Bapas Kelas I Jakarta Timur/Jakarta Utara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
89	Bapas Kelas I Surakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
90	Bapas Kelas II Watampone	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
91	BPHN	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
92	Ditjen Administrasi Hukum Umum	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
93	Ditjen Kekayaan Intelektual	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
94	Kantor Imigrasi Kelas I Bogor	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
95	Kantor Imigrasi Kelas I Jambi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
96	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
97	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
98	Kantor Imigrasi Kelas I Malang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
99	Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
100	Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
101	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
102	Kantor Imigrasi Kelas II Bagan Siapi-Api	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
103	Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
104	Kantor Imigrasi Kelas II Belawan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
105	Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
106	Kantor Imigrasi Kelas II Bitung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
107	Kantor Imigrasi Kelas II Kediri	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
108	Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
109	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
110	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
111	Kantor Imigrasi Kelas II Pati	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
112	Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
113	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
114	Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
115	Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
116	Kantor Imigrasi Kelas III Takengon	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
117	Kantor Wilayah DKI Jakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
118	Kantor Wilayah Gorontalo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
119	Kantor Wilayah Jawa Timur	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
120	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
121	Kantor Wilayah NTB	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
122	Kantor Wilayah Riau	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
123	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
124	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
125	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
126	Kantor Wilayah Yogyakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
127	Lapas Kelas I Cirebon	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
128	Lapas Kelas II A Banceuy Bandung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
129	Lapas Kelas II B Tahuna	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
130	Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
131	Lapas Perempuan Kelas II A Denpasar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
132	Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
133	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
134	Lapas Terbuka Kelas III Rumbai	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
135	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
136	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
137	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
138	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
139	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangkaraya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
140	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
141	Politeknik Ilmu Keimigrasian	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
142	Rumah Detensi Imigrasi Manado	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
143	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
144	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
145	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
146	Rupbasan Kelas I Bandung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
147	Rupbasan Kelas I Denpasar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
148	Rupbasan Kelas I Palangkaraya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
149	Rupbasan Kelas II Wates	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
150	Rutan Kelas II A Yogyakarta	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
151	Rutan Kelas II B Batang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
152	Rutan Kelas II B Kraksaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
153	Rutan Kelas II B Pangkajene	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
154	Rutan Kelas II B Purworejo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
155	Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
156	Rutan Kelas II B Wonosari	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
157	Rutan Kelas II B Wonosobo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
158	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Agung
159	Kejaksaan Negeri Bangka Barat	Kejaksaan Agung
160	Kejaksaan Negeri Barito Timur	Kejaksaan Agung
161	Kejaksaan Negeri Batang	Kejaksaan Agung
162	Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara	Kejaksaan Agung
163	Kejaksaan Negeri Berau	Kejaksaan Agung
164	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	Kejaksaan Agung
165	Kejaksaan Negeri Dairi	Kejaksaan Agung
166	Kejaksaan Negeri Depok	Kejaksaan Agung
167	Kejaksaan Negeri Gunung Kidul	Kejaksaan Agung
168	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kejaksaan Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
169	Kejaksaan Negeri Jambi	Kejaksaan Agung
170	Kejaksaan Negeri Jeneponto	Kejaksaan Agung
171	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Kejaksaan Agung
172	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya	Kejaksaan Agung
173	Kejaksaan Negeri Karanganyar	Kejaksaan Agung
174	Kejaksaan Negeri Kepahiang	Kejaksaan Agung
175	Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	Kejaksaan Agung
176	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Kejaksaan Agung
177	Kejaksaan Negeri Magetan	Kejaksaan Agung
178	Kejaksaan Negeri Maros	Kejaksaan Agung
179	Kejaksaan Negeri Merauke	Kejaksaan Agung
180	Kejaksaan Negeri Mukomuko	Kejaksaan Agung
181	Kejaksaan Negeri Ngawi	Kejaksaan Agung
182	Kejaksaan Negeri Pacitan	Kejaksaan Agung
183	Kejaksaan Negeri Prabumulih	Kejaksaan Agung
184	Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	Kejaksaan Agung
185	Kejaksaan Negeri Purwokerto	Kejaksaan Agung
186	Kejaksaan Negeri Salatiga	Kejaksaan Agung
187	Kejaksaan Negeri Sambas	Kejaksaan Agung
188	Kejaksaan Negeri Sintang	Kejaksaan Agung
189	Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Kejaksaan Agung
190	Kejaksaan Negeri Tabanan	Kejaksaan Agung
191	Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang	Kejaksaan Agung
192	Kejaksaan Negeri Ternate	Kejaksaan Agung
193	Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan	Kejaksaan Agung
194	Kejaksaan Negeri Tulung Agung	Kejaksaan Agung
195	Kejaksaan Negeri Wonosobo	Kejaksaan Agung
196	Kejaksaan Tinggi Banten	Kejaksaan Agung
197	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Kejaksaan Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
198	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Kejaksaan Agung
199	Akpol Lemdiklat Polri	Kepolisian Republik Indonesia
200	Biro SDM Polda Aceh	Kepolisian Republik Indonesia
201	Biro SDM Polda Sumatera Utara	Kepolisian Republik Indonesia
202	Biro SDM Polda Sumsel	Kepolisian Republik Indonesia
203	Diklat Reserse Lemdiklat Polri	Kepolisian Republik Indonesia
204	Ditbinmas Polda DIY	Kepolisian Republik Indonesia
205	Ditintelkam Polda DIY	Kepolisian Republik Indonesia
206	Ditintelkam Polda Jawa Tengah	Kepolisian Republik Indonesia
207	Ditlantas Polda Jawa Tengah	Kepolisian Republik Indonesia
208	Ditlantas Polda Jawa Timur	Kepolisian Republik Indonesia
209	Ditreskrimum Polda Bali	Kepolisian Republik Indonesia
210	Polres Banyuasin	Kepolisian Republik Indonesia
211	Polres Bau-Bau	Kepolisian Republik Indonesia
212	Polres Bondowoso	Kepolisian Republik Indonesia
213	Polres Boyolali	Kepolisian Republik Indonesia
214	Polres Buleleng	Kepolisian Republik Indonesia
215	Polres Kaimana	Kepolisian Republik Indonesia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
216	Polres Kudus	Kepolisian Republik Indonesia
217	Polres Kulon Progo	Kepolisian Republik Indonesia
218	Polres Lhokseumawe	Kepolisian Republik Indonesia
219	Polres Magelang Kota	Kepolisian Republik Indonesia
220	Polres Majalengka	Kepolisian Republik Indonesia
221	Polres Musi Banyuasin	Kepolisian Republik Indonesia
222	Polres Ogan Komering Ilir	Kepolisian Republik Indonesia
223	Polres Ogan Komering Ulu Timur	Kepolisian Republik Indonesia
224	Polres Pacitan	Kepolisian Republik Indonesia
225	Polres Palangkaraya	Kepolisian Republik Indonesia
226	Polres Pamekasan	Kepolisian Republik Indonesia
227	Polres Payakumbuh	Kepolisian Republik Indonesia
228	Polres Penajam Paser Utara	Kepolisian Republik Indonesia
229	Polres Purworejo	Kepolisian Republik Indonesia
230	Polres Tanjung Jabung Barat	Kepolisian Republik Indonesia
231	Polres Tapin	Kepolisian Republik Indonesia
232	Polres Tegal Kota	Kepolisian Republik Indonesia
233	Polres Wonogiri	Kepolisian Republik Indonesia

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
234	Polresta Yogyakarta	Kepolisian Republik Indonesia
235	Rumkit Bhayangkara Polda DIY	Kepolisian Republik Indonesia
236	Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Keuangan Negara	Badan Pemeriksa Keuangan
237	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu	Badan Pemeriksa Keuangan
238	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	Badan Pemeriksa Keuangan
239	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Mahkamah Konstitusi
240	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	Sekretariat Jenderal DPR RI
241	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Sekretariat Jenderal DPR RI
242	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	Kementerian Agama
243	Kantor Pertanahan Kota Semarang	Kementerian ATR/BPN
244	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Kementerian ATR/BPN
245	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
246	Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kementerian ATR/BPN
247	Kantor Pertanahan Kota Cirebon	Kementerian ATR/BPN
248	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II	Kementerian ATR/BPN
249	Kantor Pertanahan Kota Surakarta	Kementerian ATR/BPN
250	Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	Kementerian ATR/BPN
251	Kantor Pertanahan Kota Makassar	Kementerian ATR/BPN
252	Kantor Pertanahan Kota Mataram	Kementerian ATR/BPN
253	Kantor Pertanahan Kota Batam	Kementerian ATR/BPN

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
254	Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri
255	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri
256	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Kementerian Dalam Negeri
257	Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
258	Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
259	Direktorat Promosi dan Kemitraan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
260	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
261	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
262	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
263	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
264	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
265	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
266	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
267	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
268	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
269	Politeknik Energi dan Mineral "Akamigas"	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
270	Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Kementerian Kesehatan
271	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang	Kementerian Kesehatan
272	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Kementerian Kesehatan
273	Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	Kementerian Kesehatan
274	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	Kementerian Kesehatan
275	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas (KKP) II Samarinda	Kementerian Kesehatan
276	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta	Kementerian Kesehatan
277	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah	Kementerian Kesehatan
278	Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo	Kementerian Kesehatan
279	Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya	Kementerian Kesehatan
280	Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar	Kementerian Kesehatan
281	Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang	Kementerian Ketenagakerjaan
282	Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran	Kementerian Keuangan
283	Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi	Kementerian Keuangan
284	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Kementerian Keuangan
285	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	Kementerian Keuangan
286	KPTIK BMN Makassar	Kementerian Keuangan
287	KPTIK BMN Medan	Kementerian Keuangan
288	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
289	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado	Kementerian Keuangan
290	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta	Kementerian Keuangan
291	Kanwil DJBC Banten	Kementerian Keuangan
292	Kanwil DJBC Jakarta	Kementerian Keuangan
293	Kanwil DJBC Jawa Barat	Kementerian Keuangan
294	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Kementerian Keuangan
295	Kanwil DJBC Jawa Timur II	Kementerian Keuangan
296	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	Kementerian Keuangan
297	Kanwil DJBC Sumatera Utara	Kementerian Keuangan
298	KPPBC TMP Tanjung Emas	Kementerian Keuangan
299	KPPBC TMP B Atambua	Kementerian Keuangan
300	KPPBC TMP B Balikpapan	Kementerian Keuangan
301	KPPBC TMP B Banjarmasin	Kementerian Keuangan
302	KPPBC TMP B Sidoarjo	Kementerian Keuangan
303	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	Kementerian Keuangan
304	KPPBC TMP B Tarakan	Kementerian Keuangan
305	KPPBC TMP B Yogyakarta	Kementerian Keuangan
306	KPPBC TMP C Amamapare	Kementerian Keuangan
307	KPPBC TMP C Banda Aceh	Kementerian Keuangan
308	KPPBC TMP C Bengkulu	Kementerian Keuangan
309	KPPBC TMP C Biak	Kementerian Keuangan
310	KPPBC TMP C Bitung	Kementerian Keuangan
311	KPPBC TMP C Bojonegoro	Kementerian Keuangan
312	KPPBC TMP C Bontang	Kementerian Keuangan
313	KPPBC TMP C Jayapura	Kementerian Keuangan
314	KPPBC TMP C Lhokseumawe	Kementerian Keuangan
315	KPPBC TMP C Madiun	Kementerian Keuangan
316	KPPBC TMP C Magelang	Kementerian Keuangan
317	KPPBC TMP C Meulaboh	Kementerian Keuangan
318	KPPBC TMP C Pangkalan Bun	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
319	KPPBC TMP C Pangkalpinang	Kementerian Keuangan
320	KPPBC TMP C Probolinggo	Kementerian Keuangan
321	KPPBC TMP C Pulang Pisau	Kementerian Keuangan
322	KPPBC TMP C Tasikmalaya	Kementerian Keuangan
323	KPPBC TMP C Teluk Nibung	Kementerian Keuangan
324	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Medan	Kementerian Keuangan
325	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya	Kementerian Keuangan
326	PSO BC Tipe B Sorong	Kementerian Keuangan
327	Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan
328	Direktorat Barang Milik Negara	Kementerian Keuangan
329	Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Keuangan
330	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	Kementerian Keuangan
331	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	Kementerian Keuangan
332	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain	Kementerian Keuangan
333	Kanwil DJKN Aceh	Kementerian Keuangan
334	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	Kementerian Keuangan
335	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Kementerian Keuangan
336	KPKNL Balikpapan	Kementerian Keuangan
337	KPKNL Bandung	Kementerian Keuangan
338	KPKNL Bima	Kementerian Keuangan
339	KPKNL Gorontalo	Kementerian Keuangan
340	KPKNL Kendari	Kementerian Keuangan
341	KPKNL Lhokseumawe	Kementerian Keuangan
342	KPKNL Pamekasan	Kementerian Keuangan
343	KPKNL Pangkal Pinang	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
344	KPKNL Pangkalan Bun	Kementerian Keuangan
345	KPKNL Pekanbaru	Kementerian Keuangan
346	KPKNL Samarinda	Kementerian Keuangan
347	KPKNL Singkawang	Kementerian Keuangan
348	KPKNL Sorong	Kementerian Keuangan
349	KPKNL Ternate	Kementerian Keuangan
350	Sekretariat Direktorat Jenderal, DJP	Kementerian Keuangan
351	Direktorat Keberatan dan Banding	Kementerian Keuangan
352	Direktorat Penegakan Hukum	Kementerian Keuangan
353	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Kementerian Keuangan
354	Direktorat Peraturan Perpajakan II	Kementerian Keuangan
355	Direktorat Perpajakan Internasional	Kementerian Keuangan
356	Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan	Kementerian Keuangan
357	Direktorat Transformasi Proses Bisnis	Kementerian Keuangan
358	Kanwil DJP Jakarta Barat	Kementerian Keuangan
359	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	Kementerian Keuangan
360	Kanwil DJP Jakarta Timur	Kementerian Keuangan
361	Kanwil DJP Jawa Barat II	Kementerian Keuangan
362	Kanwil DJP Jawa Tengah I	Kementerian Keuangan
363	Kanwil DJP Jawa Timur I	Kementerian Keuangan
364	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	Kementerian Keuangan
365	Kanwil DJP Nusa Tenggara	Kementerian Keuangan
366	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	Kementerian Keuangan
367	KPP Badan dan Orang Asing	Kementerian Keuangan
368	KPP Madya Palembang	Kementerian Keuangan
369	KPP Pratama Argamakmur	Kementerian Keuangan
370	KPP Pratama Badung Selatan	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
371	KPP Pratama Barabai	Kementerian Keuangan
372	KPP Pratama Batang	Kementerian Keuangan
373	KPP Pratama Bekasi Barat	Kementerian Keuangan
374	KPP Pratama Cilegon	Kementerian Keuangan
375	KPP Pratama Gorontalo	Kementerian Keuangan
376	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	Kementerian Keuangan
377	KPP Pratama Jakarta Pancoran	Kementerian Keuangan
378	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	Kementerian Keuangan
379	KPP Pratama Jakarta Pluit	Kementerian Keuangan
380	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	Kementerian Keuangan
381	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Kementerian Keuangan
382	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu	Kementerian Keuangan
383	KPP Pratama Jember	Kementerian Keuangan
384	KPP Pratama Kabanjahe	Kementerian Keuangan
385	KPP Pratama Kayu Agung	Kementerian Keuangan
386	KPP Pratama Kendari	Kementerian Keuangan
387	KPP Pratama Kupang	Kementerian Keuangan
388	KPP Pratama Langsa	Kementerian Keuangan
389	KPP Pratama Lhokseumawe	Kementerian Keuangan
390	KPP Pratama Madiun	Kementerian Keuangan
391	KPP Pratama Magelang	Kementerian Keuangan
392	KPP Pratama Makassar Selatan	Kementerian Keuangan
393	KPP Pratama Mataram Timur	Kementerian Keuangan
394	KPP Pratama Medan Timur	Kementerian Keuangan
395	KPP Pratama Padang Sidempuan	Kementerian Keuangan
396	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Kementerian Keuangan
397	KPP Pratama Pamekasan	Kementerian Keuangan
398	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
399	KPP Pratama Pondok Aren	Kementerian Keuangan
400	KPP Pratama Pondok Gede	Kementerian Keuangan
401	KPP Pratama Praya	Kementerian Keuangan
402	KPP Pratama Purwakarta	Kementerian Keuangan
403	KPP Pratama Raba Bima	Kementerian Keuangan
404	KPP Pratama Sleman	Kementerian Keuangan
405	KPP Pratama Solok	Kementerian Keuangan
406	KPP Pratama Subang	Kementerian Keuangan
407	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Kementerian Keuangan
408	KPP Pratama Tangerang Barat	Kementerian Keuangan
409	KPP Pratama Teluk Betung	Kementerian Keuangan
410	KPP Pratama Temanggung	Kementerian Keuangan
411	KPP Pratama Tulungagung	Kementerian Keuangan
412	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	Kementerian Keuangan
413	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi	Kementerian Keuangan
414	Kanwil DJPb Provinsi Aceh	Kementerian Keuangan
415	Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kementerian Keuangan
416	KPPN Tipe A1 Banjarmasin	Kementerian Keuangan
417	KPPN Tipe A1 Batam	Kementerian Keuangan
418	KPPN Tipe A1 Baturaja	Kementerian Keuangan
419	KPPN Tipe A1 Bengkulu	Kementerian Keuangan
420	KPPN Tipe A1 Buntok	Kementerian Keuangan
421	KPPN Tipe A1 Dumai	Kementerian Keuangan
422	KPPN Tipe A1 Gorontalo	Kementerian Keuangan
423	KPPN Tipe A1 Jayapura	Kementerian Keuangan
424	KPPN Tipe A1 Klaten	Kementerian Keuangan
425	KPPN Tipe A1 Langsa	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
426	KPPN Tipe A1 Lhok Seumawe	Kementerian Keuangan
427	KPPN Tipe A1 Medan I	Kementerian Keuangan
428	KPPN Tipe A1 Merauke	Kementerian Keuangan
429	KPPN Tipe A1 Meulaboh	Kementerian Keuangan
430	KPPN Tipe A1 Palangkaraya	Kementerian Keuangan
431	KPPN Tipe A1 Pangkalpinang	Kementerian Keuangan
432	KPPN Tipe A1 Pekalongan	Kementerian Keuangan
433	KPPN Tipe A1 Pematang Siantar	Kementerian Keuangan
434	KPPN Tipe A1 Poso	Kementerian Keuangan
435	KPPN Tipe A1 Samarinda	Kementerian Keuangan
436	KPPN Tipe A1 Semarang I	Kementerian Keuangan
437	KPPN Tipe A1 Serang	Kementerian Keuangan
438	KPPN Tipe A1 Tanjung Selor	Kementerian Keuangan
439	KPPN Tipe A1 Tanjung	Kementerian Keuangan
440	KPPN Tipe A1 Tebingtinggi	Kementerian Keuangan
441	KPPN Tipe A1 Tegal	Kementerian Keuangan
442	KPPN Tipe A2 Atambua	Kementerian Keuangan
443	KPPN Tipe A2 Balige	Kementerian Keuangan
444	KPPN Tipe A2 Banjarnegara	Kementerian Keuangan
445	KPPN Tipe A2 Banyuwangi	Kementerian Keuangan
446	KPPN Tipe A2 Bau-Bau	Kementerian Keuangan
447	KPPN Tipe A2 Biak	Kementerian Keuangan
448	KPPN Tipe A2 Fak-Fak	Kementerian Keuangan
449	KPPN Tipe A2 Kuala Tungkal	Kementerian Keuangan
450	KPPN Tipe A2 Kutacane	Kementerian Keuangan
451	KPPN Tipe A2 Lubuk Sikaping	Kementerian Keuangan
452	KPPN Tipe A2 Makale	Kementerian Keuangan
453	KPPN Tipe A2 Mukomuko	Kementerian Keuangan
454	KPPN Tipe A2 Nunukan	Kementerian Keuangan
455	KPPN Tipe A2 Pacitan	Kementerian Keuangan
456	KPPN Tipe A2 Painan	Kementerian Keuangan
457	KPPN Tipe A2 Putussibau	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
458	KPPN Tipe A2 Rangkasbitung	Kementerian Keuangan
459	KPPN Tipe A2 Rantau Prapat	Kementerian Keuangan
460	KPPN Tipe A2 Sanggau	Kementerian Keuangan
461	KPPN Tipe A2 Sinjai	Kementerian Keuangan
462	KPPN Tipe A2 Sumbawa Besar	Kementerian Keuangan
463	KPPN Tipe A2 Sungai Penuh	Kementerian Keuangan
464	KPPN Tipe A2 Takengon	Kementerian Keuangan
465	KPPN Tipe A2 Tapaktuan	Kementerian Keuangan
466	KPPN Tipe A2 Tarakan	Kementerian Keuangan
467	KPPN Tipe A2 Timika	Kementerian Keuangan
468	KPPN Tipe A2 Tolitoli	Kementerian Keuangan
469	KPPN Tipe A2 Tuban	Kementerian Keuangan
470	KPPN Tipe A2 Watampone	Kementerian Keuangan
471	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
472	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
473	Kedeputian Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
474	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi SDA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
475	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
476	Pusat Rencana dan Pengembangan SDM	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
477	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
478	Direktorat Fasilitas Diplomatik	Kementerian Luar Negeri
479	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian Luar Negeri
480	Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
481	Direktorat Komunikasi Pemasaran	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
482	Politeknik Pariwisata Medan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
483	Politeknik Pariwisata Makassar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
484	Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
485	Balai Teknologi Air Minum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
486	PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
487	PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
488	Politeknik Negeri Bandung	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
489	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
490	LPMP Nusa Tenggara Barat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
491	LPMP Jawa Barat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
492	LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
493	PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
494	PPPPTK Matematika	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
495	PPPPTK Seni dan Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
496	PPPPTK Pertanian	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
497	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
498	Museum Basoeki Abdullah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
499	Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
500	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
501	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Kementerian Perdagangan
502	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Kementerian Perdagangan
503	Direktorat Metrologi	Kementerian Perdagangan
504	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
505	Satuan Pelayanan UPPKB Cekik - BPTD Wil. XII Provinsi Bali dan NTB	Kementerian Perhubungan
506	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno - BPTD Wil. X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Kementerian Perhubungan
507	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	Kementerian Perhubungan
508	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Kementerian Perhubungan
509	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta	Kementerian Perhubungan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
510	Politeknik Penerbangan Medan	Kementerian Perhubungan
511	Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas II Gresik	Kementerian Perhubungan
512	Distrik Navigasi Kelas I Makassar	Kementerian Perhubungan
513	Direktorat Angkutan Udara	Kementerian Perhubungan
514	Direktorat Navigasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan
515	Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya	Kementerian Perhubungan
516	Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	Kementerian Perhubungan
517	Otoritas Bandar Udara Wilayah VII - Balikpapan	Kementerian Perhubungan
518	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Perhubungan
519	Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta	Kementerian Perindustrian
520	Balai Besar Tekstil Bandung	Kementerian Perindustrian
521	Baristand Industri Banjarbaru	Kementerian Perindustrian
522	Baristand Industri Padang	Kementerian Perindustrian
523	Politeknik ATI Padang	Kementerian Perindustrian
524	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Kementerian Pertanian
525	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	Kementerian Pertanian
526	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Kementerian Pertanian
527	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Kementerian Pertanian
528	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Kementerian Pertanian
529	Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	Kementerian Pertanian

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
530	Pusat Veteriner Farma, Surabaya	Kementerian Pertanian
531	Akademi Angkatan Laut	Tentara Nasional Indonesia
532	Dinas Penerangan Angkatan Laut	Tentara Nasional Indonesia
533	Grup 1 Komando Pasukan Khusus	Tentara Nasional Indonesia
534	Grup 3 Komando Pasukan Khusus	Tentara Nasional Indonesia
535	Lembaga Kedokteran Gigi R.E. Martadinata	Tentara Nasional Indonesia
536	RSAU dr. Esnawan Antariksa	Tentara Nasional Indonesia
537	Rumah Sakit Ciremai	Tentara Nasional Indonesia
538	Rumah Sakit Dustira	Tentara Nasional Indonesia
539	Rumah Sakit Marinir Cilandak	Tentara Nasional Indonesia
540	Rumah Sakit Tk.II dr. Soejono	Tentara Nasional Indonesia
541	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut	Tentara Nasional Indonesia
542	Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial	Badan Informasi Geospasial
543	Kantor Regional IX BKN Jayapura	Badan Kepegawaian Negara
544	Kantor Regional XI Manado	Badan Kepegawaian Negara
545	Kantor Regional I BKN Jogjakarta	Badan Kepegawaian Negara
546	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
547	Direktorat Keluarga Remaja	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
548	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
549	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
550	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
551	Stasiun Klimatologi Semarang	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
552	Stasiun Meteorologi Ngurah Rai Denpasar	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
553	Stasiun Geofisika Sanglah	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
554	Stasiun Meteorologi Perak II Surabaya	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
555	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
556	Stasiun Meteorologi Maritim Paotere	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
557	Stasiun Meteorologi Kualanamu	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
558	Stasiun Meteorologi Juanda	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
559	Balai Besar MKG Wilayah II Tangerang Selatan	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
560	BNNP Sulawesi Selatan	Badan Narkotika Nasional
561	BNNP Jawa Tengah	Badan Narkotika Nasional
562	BNNP Bali	Badan Narkotika Nasional
563	BNNP Jawa Timur	Badan Narkotika Nasional
564	Loka Rehabilitasi BNN Batam	Badan Narkotika Nasional
565	BP3TKI Lampung	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
566	BP3TKI Mataram	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
567	BP3TKI Serang	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
568	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Badan Pengawas Obat dan Makanan
569	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
570	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
571	Direktorat Registrasi Obat	Badan Pengawas Obat dan Makanan
572	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Badan Pengawas Obat dan Makanan
573	BBPOM di Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan
574	BBPOM di Semarang	Badan Pengawas Obat dan Makanan
575	BPOM di Gorontalo	Badan Pengawas Obat dan Makanan
576	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
577	Direktorat Pengawasan Kosmetik	Badan Pengawas Obat dan Makanan
578	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
579	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
580	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat	Badan Pengawas Pemilihan Umum
581	Balai Bioteknologi (Biotek)	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
582	BPS Kabupaten Jember	Badan Pusat Statistik
583	BPS Kabupaten Pati	Badan Pusat Statistik
584	BPS Kabupaten Sigi	Badan Pusat Statistik
585	BPS Kota Malang	Badan Pusat Statistik
586	BPS Kota Pekalongan	Badan Pusat Statistik
587	BPS Kota Semarang	Badan Pusat Statistik
588	BPS Kota Singkawang	Badan Pusat Statistik
589	BPS Kota Surakarta	Badan Pusat Statistik
590	BPS Provinsi Jawa Tengah	Badan Pusat Statistik

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
591	BPS Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung	Badan Pusat Statistik
592	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Badan Pusat Statistik
593	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Badan Pusat Statistik
594	BPS Provinsi Sumatera Barat	Badan Pusat Statistik
595	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Badan Pusat Statistik
596	Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)	Badan Siber dan Sandi Negara
597	Direktorat Akreditasi Laboratorium	Badan Standardisasi Nasional
598	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Badan Standardisasi Nasional
599	Pusat Diseminasi dan Kemitraan	Badan Tenaga Nuklir Nasional
600	Pusat Sains dan Teknologi Akselerator	Badan Tenaga Nuklir Nasional
601	Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan	Badan Tenaga Nuklir Nasional
602	Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	Badan Tenaga Nuklir Nasional
603	Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara	Lembaga Administrasi Negara
604	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Lembaga Administrasi Negara
605	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan	Lembaga Administrasi Negara
606	Politeknik STIA LAN Makassar	Lembaga Administrasi Negara

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
607	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
608	Pusat Teknologi Penerbangan	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
609	Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
610	Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
611	Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi	Perpustakaan Nasional
612	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Perpustakaan Nasional
613	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Perpustakaan Nasional
614	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Sekretariat Kabinet
615	Biro Sumber Daya Manusia	Sekretariat Negara
616	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
617	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
618	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
619	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
620	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
621	Laboratorium Kesehatan Daerah	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
622	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
623	RSUD Tarakan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
624	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
625	Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan DIY	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
626	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan DIY	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
627	UPTD RSUD Al Ihsan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
628	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
630	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah (Kantor Bersama Samsat) Nganjuk, Bapenda Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
631	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
632	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
633	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	Pemerintah Kab. Badung
634	Bagian PBJ SETDA Kabupaten Banggai	Pemerintah Kab. Banggai
635	RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	Pemerintah Kab. Banjarnegara
636	RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	Pemerintah Kab. Banyumas
637	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi	Pemerintah Kab. Banyuwangi

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
638	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang	Pemerintah Kab. Batang
639	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	Pemerintah Kab. Buleleng
640	Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Pemerintah Kab. Cilacap
641	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	Pemerintah Kab. Cilacap
642	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak	Pemerintah Kab. Demak
643	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	Pemerintah Kab. Grobogan
644	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	Pemerintah Kab. Gunung Kidul
645	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
646	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara	Pemerintah Kab. Jepara
647	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Pemerintah Kab. Kendal
648	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus	Pemerintah Kab. Kudus
649	Puskesmas Sekaran Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan
650	Puskesmas Brondong Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan
651	Puskesmas Karanggeneng Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan
652	Puskesmas Dradah Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
653	Puskesmas Deket Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan
654	RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan
655	RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim	Pemerintah Kab. Muara Enim
656	UPT Puskesmas Kendal	Pemerintah Kab. Ngawi
657	UPT Puskesmas Kwadungan	Pemerintah Kab. Ngawi
658	Puskesmas Bubakan Kecamatan Tulakan	Pemerintah Kab. Pacitan
659	UPTD Puskesmas Padaherang Kabupaten Pangandaran	Pemerintah Kab. Pangandaran
660	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Pemerintah Kab. Pemalang
661	Puskesmas Bungkal Kab. Ponorogo	Pemerintah Kab. Ponorogo
662	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo	Pemerintah Kab. Probolinggo
663	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	Pemerintah Kab. Sidoarjo
664	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemerintah Kab. Sleman
665	Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep	Pemerintah Kab. Sumenep
666	BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	Pemerintah Kab. Tanah Laut
667	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Pemerintah Kab. Tanah Laut
668	UPTD Puskesmas Tuban	Pemerintah Kab. Tuban
669	Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliwiro Kabupaten Wonosobo	Pemerintah Kab. Wonosobo
670	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung
671	Puskesmas Banjar 3	Pemerintah Kota Banjar

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
672	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota Banjarmasin
673	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah AbdulMadjid	Pemerintah Kota Bekasi
674	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	Pemerintah Kota Pekalongan
675	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan	Pemerintah Kota Pekalongan
676	Puskesmas Halmahera Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang
677	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang
678	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta
679	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal	Pemerintah Kota Tegal
680	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal	Pemerintah Kota Tegal
681	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Yogyakarta

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
1	Pengadilan Militer Utama	Mahkamah Agung
2	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	Mahkamah Agung
3	Pengadilan Tinggi Semarang	Mahkamah Agung
4	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Mahkamah Agung
5	Pengadilan Negeri Wates	Mahkamah Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
6	Pengadilan Militer III-13 Madiun	Mahkamah Agung
7	Pengadilan Negeri Bogor	Mahkamah Agung
8	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	Mahkamah Agung
9	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	Mahkamah Agung
10	Lapas Kelas I Malang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Kantor Imigrasi Kelas II Karawang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12	Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13	Lapas Perempuan Kelas II A Semarang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
15	Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16	Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
17	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18	Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19	Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20	Lapas Kelas II A Cibinong	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21	Kejaksaan Negeri Jember	Kejaksaan Agung
22	Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Kejaksaan Agung
23	Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	Kejaksaan Agung
24	Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung	Kejaksaan Agung
25	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Kejaksaan Agung

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
26	Kejaksaan Negeri Badung	Kejaksaan Agung
27	Kejaksaan Negeri Pekanbaru	Kejaksaan Agung
28	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	Kejaksaan Agung
29	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	Kejaksaan Agung
30	Ditlantas Polda DIY	Kepolisian Republik Indonesia
31	Polresta Malang Kota	Kepolisian Republik Indonesia
32	Ditreskrimsus Polda Kalteng	Kepolisian Republik Indonesia
33	Polres Sleman	Kepolisian Republik Indonesia
34	Polres Bojonegoro	Kepolisian Republik Indonesia
35	Polres Pelabuhan Tanjung Perak	Kepolisian Republik Indonesia
36	Polres Gowa	Kepolisian Republik Indonesia
37	Ditreskrimsus Polda Kalsel	Kepolisian Republik Indonesia
38	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Badan Pemeriksa Keuangan
39	Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar	Kementerian Agama
40	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	Kementerian Agama
41	Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	Kementerian ATR/BPN
42	PPSDM Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
43	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
44	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Kementerian Keuangan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
45	KPKNL Bekasi	Kementerian Keuangan
46	KPKNL Madiun	Kementerian Keuangan
47	KPKNL Pekalongan	Kementerian Keuangan
48	KPKNL Tangerang I	Kementerian Keuangan
49	KPKNL Tegal	Kementerian Keuangan
50	KPP Madya Denpasar	Kementerian Keuangan
51	KPP Madya Jakarta Timur	Kementerian Keuangan
52	KPP Madya Tangerang	Kementerian Keuangan
53	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	Kementerian Keuangan
54	KPP Pratama Malang Utara	Kementerian Keuangan
55	KPP Wajib Pajak Besar Empat	Kementerian Keuangan
56	KPPBC TMC Kudus	Kementerian Keuangan
57	KPPBC TMP A Bandung	Kementerian Keuangan
58	KPPBC TMP C Banyuwangi	Kementerian Keuangan
59	KPPBC TMP C Cilacap	Kementerian Keuangan
60	KPPBC TMP Ngurah Rai	Kementerian Keuangan
61	KPPN Tipe A1 Bandung II	Kementerian Keuangan
62	KPPN Tipe A1 Lahat	Kementerian Keuangan
63	KPPN Tipe A1 Madiun	Kementerian Keuangan
64	KPPN Tipe A1 Pekanbaru	Kementerian Keuangan
65	KPPN Tipe A1 Surakarta	Kementerian Keuangan
66	KPPN Tipe A1 Yogyakarta	Kementerian Keuangan
67	KPPN Tipe A2 Pelaihari	Kementerian Keuangan
68	KPPN Tipe A2 Singaraja	Kementerian Keuangan
69	LPMP Jawa Tengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
70	PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
71	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang	Kementerian Perindustrian
72	SMK-Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor	Kementerian Perindustrian
73	SMK-Sekolah Menengah Analis Kimia Padang	Kementerian Perindustrian
74	Baristand Industri Surabaya	Kementerian Perindustrian
75	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Kementerian Pertanian
76	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
77	BPS Kabupaten Gianyar	Badan Pusat Statistik
78	BPS Kota Madiun	Badan Pusat Statistik
79	Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
80	RSUD Dr. Moewardi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
81	RSUD Tugurejo	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kab. Bantul

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RIJIKO KUMOLO